

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR /PERMEN-KP/2017
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MELALUI
PENYESUAIAN/*INPASSING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap melalui Penyesuaian/*Inpassing*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111),

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 271);
 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap.
3. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap.
4. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dalam jangka waktu tertentu.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap adalah direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
8. Unit Kerja adalah unit kerja eselon II atau unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian atau unit kerja eselon II atau unit pelaksana teknis daerah pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi persyaratan, tata cara Penyesuaian/*Inpassing*, dan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

BAB II PERSYARATAN PENYESUAIAN/*INPASSING*

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* harus berdasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap.
- (2) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 4

PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap melalui Penyesuaian/*Inpassing* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1)/Diploma empat (D-4);
- d. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
- e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. usia paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir;
- g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perikanan tangkap paling singkat 2 (dua) tahun dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang perikanan tangkap; dan
- h. mendapatkan persetujuan dari atasan langsung.

Pasal 5

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PNS yang dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional

Pengelola Produksi Perikanan Tangkap melalui Penyesuaian/*Inpassing* harus:

- a. tidak sedang menjalani/dijatui hukuman disiplin tingkat sedang atau berat pada masa Penyesuaian/*Inpassing*;
- b. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada masa Penyesuaian/*Inpassing*; dan
- c. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada masa Penyesuaian/*Inpassing*.

BAB III

TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*

Bagian Kesatu

Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap di Lingkungan Kementerian

Pasal 6

- (1) Pimpinan Unit Kerja mengidentifikasi PNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Penyesuaian/*Inpassing* dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diusulkan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap.
- (3) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - b. surat keterangan sehat dari dokter;
 - c. fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

- d. fotokopi penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - e. surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap;
 - f. surat keterangan dari atasan langsung yang menyatakan bahwa PNS tersebut:
 - 1. tidak sedang menjalani/dijatuh hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - 2. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - 3. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara; dan
 - 4. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perikanan tangkap paling singkat 2 (dua) tahun dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang perikanan tangkap;
 - g. surat persetujuan dari atasan langsung.
- (4) Pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap melakukan verifikasi terhadap:
- a. kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan usulan beserta berkas yang dilampirkan sesuai dengan yang dipersyaratkan; dan
 - b. tingkat pendidikan, pangkat dan golongan ruang, masa kerja kepangkatan terakhir, untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah angka kredit dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah lengkap, benar, dan sah, pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap melakukan penilaian dengan memperhatikan tingkat kesesuaian antara PNS

yang diusulkan dengan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap.

- (6) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap menyampaikan usulan penetapan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap melalui Penyesuaian/*Inpassing* kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian.
- (7) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, tidak benar, tidak sah, dan/atau berdasarkan hasil penilaian tidak sesuai dengan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap mengembalikan usulan kepada pimpinan Unit Kerja, disertai dengan alasan.
- (8) Bentuk dan format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota

Pasal 7

- (1) Pimpinan Unit Kerja mengidentifikasi PNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Penyesuaian/*Inpassing* dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap.

- (2) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diusulkan kepada sekretaris daerah pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.
- (3) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - b. surat keterangan sehat dari dokter;
 - c. fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - e. surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap;
 - f. surat keterangan dari atasan langsung yang menyatakan bahwa PNS tersebut:
 1. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 2. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 3. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara; dan
 4. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perikanan tangkap paling singkat 2 (dua) tahun dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang perikanan tangkap;
 - g. surat persetujuan dari atasan langsung.
- (4) Sekretaris daerah pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap:
 - a. kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan usulan beserta berkas yang dilampirkan sesuai dengan yang dipersyaratkan; dan
 - b. tingkat pendidikan, pangkat dan golongan ruang, masa kerja kepangkatan terakhir, untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah angka

kredit dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap.

- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah lengkap, benar, dan sah, sekretaris daerah pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota melakukan penilaian dengan memperhatikan tingkat kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap.
- (6) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sekretaris daerah pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota menetapkan daftar usulan untuk dimintakan pertimbangan teknis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian, dengan dilengkapi:
 - a. data kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap; dan
 - b. data dan hasil verifikasi administrasi PNS yang akan mengikuti *Penyesuaian/Inpassing*.
- (7) Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian melakukan verifikasi terhadap data dan hasil verifikasi administrasi PNS dengan data kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, yang hasilnya berupa pertimbangan teknis.
- (8) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada sekretaris daerah pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota sebagai bahan penetapan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap melalui *Penyesuaian/Inpassing* oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.
- (9) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, tidak benar, tidak sah, dan/atau berdasarkan hasil penilaian tidak sesuai dengan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, sekretaris daerah pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota

mengembalikan usulan kepada pimpinan Unit Kerja, disertai dengan alasan.

- (10) Bentuk dan format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

Pasal 9

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian atau pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap melalui Penyesuaian/*Inpassing* dengan keputusan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PNS yang bersangkutan melalui pimpinan Unit Kerja yang mengusulkan, dengan tembusan kepada:
 - a. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi/BKD kabupaten/kota atau Biro/Bagian Kepegawaian, instansi yang bersangkutan;
 - c. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - d. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah, yang bersangkutan; dan
 - e. pejabat lain yang dianggap perlu.
- (3) Bentuk dan format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian atau pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap melalui Penyesuaian/*Inpassing* paling lambat pada tanggal 31 Januari 2019.

Pasal 12

PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap melalui Penyesuaian/*Inpassing* selanjutnya ditempatkan dan diberikan penugasan sesuai dengan jabatannya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR

DRAFT

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2017
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP
MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

SURAT PERNYATAAN DAN SURAT KETERANGAN

A. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGKAT DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

SURAT PERNYATAAN
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini,

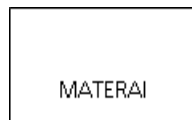
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang/T.M.T :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Kategori;
2. Tidak rangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya; dan
3. Bertanggung jawab dalam menjalankan tugas Pengelola Produksi Perikanan Tangkap.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
(tempat, tanggal)



Yang membuat pernyataan
(.....)
NIP.....

B. SURAT KETERANGAN DARI ATASAN LANGSUNG

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama

NIP

Unit Kerja

Pangkat/Gol.Ruang/T.M.T

Dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa,

Nama

NIP

Unit Kerja

Pangkat/Gol.Ruang/T.M.T

Yang bersangkutan:

- 1. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- 2. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- 3. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara; dan
- 4. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perikanan tangkap paling singkat 2 (dua) tahun dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang perikanan tangkap.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

(tempat, tanggal)

Atasan Langsung/Pimpinan Unit Kerja

(.....)

NIP.....

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2017
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP
MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

KEPUTUSAN

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
NOMOR

TENTANG

PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI
PERIKANAN TANGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara
..... NIP jabatan pangkat/golongan
ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk
diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan
Tangkap melalui Penyesuaian/*Inpassing*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan
Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap jenjang
dengan angka kredit sebesar (.)

KEDUA : **)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali
sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Paraf Persetujuan		
NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Sesditjen Perikanan Tangkap	
3.	Karo SDM Aparatur	
4.	Karo Hukum dan Organisasi	